Pledooi

mendobrak mitos kemapanan

EDISI 01/XIII/2002

Mempertanyakan Kembali Nasionalisme Indonesia

Pengertian bangsa dapat mempunyai dua arti. Pertama kesatuan orang yang sama asal-usulnya, keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya. Kedua berarti orang-orang baru yang dilahirkan karena suatu peristiwa luar biasa sehingga terbentuk suatu masyarakat. Benedict Anderson mengartikan bangsa sebagai suatu komunitas yang terbayang, *Imagined Community*.

Art : Ery

Konsep Nasionalisme terkait dengan konsep bangsa. Dalam sejarahnya nasionalisme lahir di Jerman sebagai manifestasi dari persamaan bangsa Jerman. Nasionalisme di Jerman adalah nasionalisme yang menyatukan bangsa Jerman yang memiliki kultur yang sama tetapi secara politis terpisah-pisah, bangsa Jerman disini merupakan pengertian bangsa dalam arti yang pertama. Nasionalisme Jerman melahirkan sejarah kelam kemanusiaan dengan gerakan antisemitnya.

Nasionalisme berkembang pesat di Eropa akibat dari Revolusi Perancis yang membawa kesadaran bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Konsep internationalisme pada negara komunis di gugat oleh nasionalisme. Unisoviet dirongrong dengan keinginan negara-negara pembentuknya berdiri sendiri menunjukkan kuatnya pengaruh Nasionalisme di Eropa..

Lalu bagaimana dengan nasionalisme di Indonesia sendiri? Ribuan nyawa telah dikorbankan untuk mempertahankan keutuhan bangsa dengan slogan "Persatuan dan Kesatuan"-nya. Papua menggugat, Aceh memproklamirkan diri, Riau ingin lepas, ketika itu juga perasaan nasionalisme bangsa indonesia tergugat. Aceh dijawab dengan DOM yang membawa kesengsaraan penduduknya, Timor Timur akhirnya pergi, perang etnis terjadi di Sampit, perang dengan motif agama berlangsung di Ambon.

Apa yang terjadi dengan bangsa Indonesia? Apakah benar kita sebuah bangsa dan mempunyai apa yang dinamakan kepribadian bangsa. Pertanyaan selanjutnya adalah apa kita mempunyai nasionalisme itu. Sederet pertanyan itu merupakan upaya menanyakan kembali Nasionalisme Indonesia.

Berbeda dengan Nasionalisme di Jerman yang terbentuk atas kesatuan kultur, Indonesia terdiri dari berbagai macam bangsa (dalam pengertian yang pertama) yang disatukan karena kesadaran bersama sebagai bangsa yang terjajah dan melawan pemerintahan kolonial guna menggantikannya dengan pemerintahan sendiri. Nasionalisme lebih sebagai obat mujarab untuk menyatukan kolektif masyarakat yang bebeda secara cultural dalam suatu kerangka politik yang dinamakan negara.Revolusi Perancis yang membawa konsep keadilan dan kesamaan hak menjadi semangat pendorong terhadap nasionalisme Indonesia.

Nasionalisme Indonesia menyatukan suku-suku di Nusantara yang berbeda secara kultur dengan maksud politik yaitu membentuk pemerintahan sendiri menggantikan pemerintahan kolonial. Namun nasionalisme itu dianggap sudah matang sehingga tetap efektif sebagai alasan pemersatu. Padahal terbentuknya bangsa karena suatu peristiwa besar seperti revolusi Indonesia membutuhkan
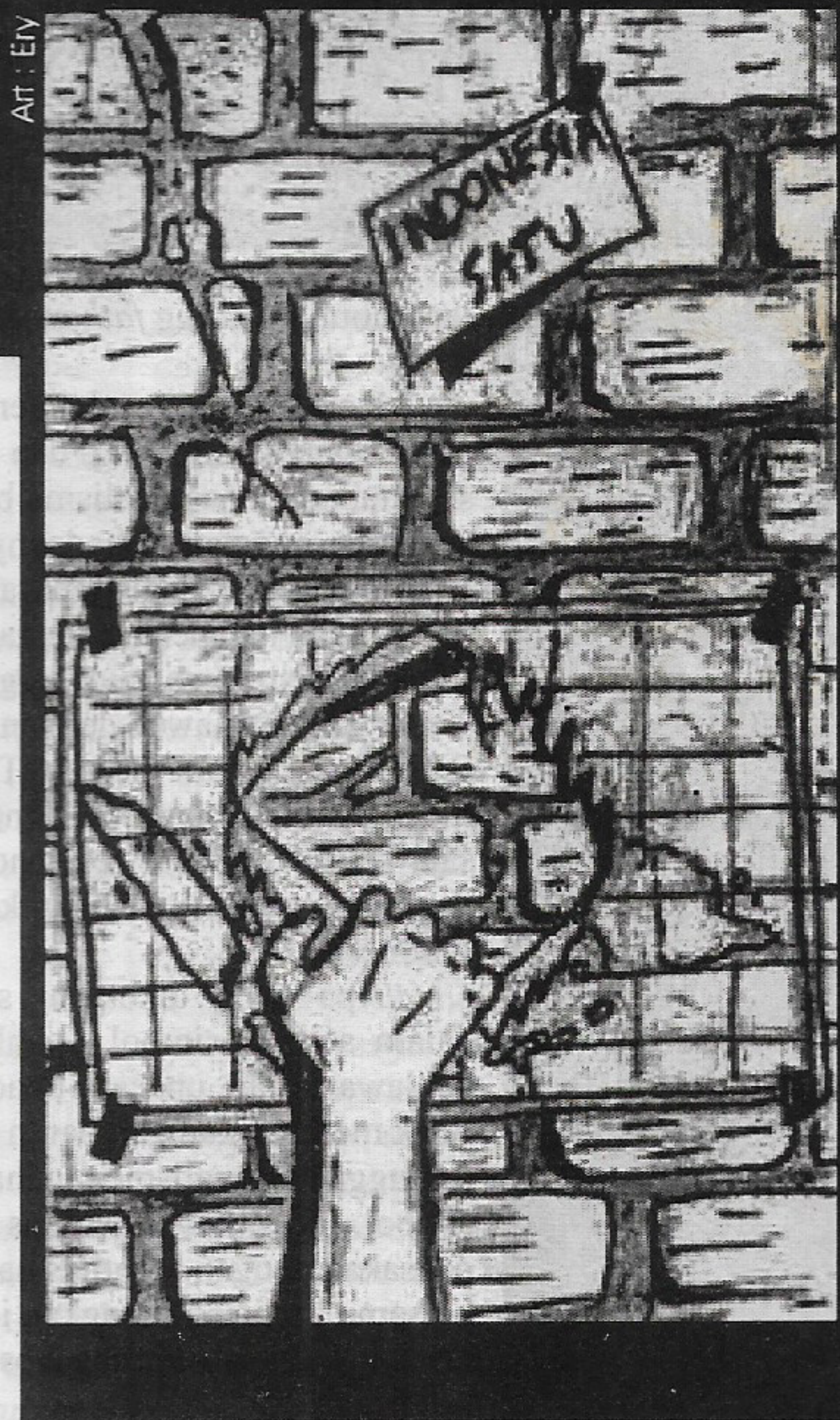
proses yang lama dan tidak sederhana..

Kesadaran berbangsa bangsa Indonesia termanifestasikan melalui Sumpah Pemuda, “Satu Bahasa”, “Satu Bangsa”, “Satu Tanah Air”. Tetapi problem perbedaan dan keberagaman budaya tidak selesai sampai di situ, karena kesadaran berbangsa itu lebih ditekankan untuk mengahadapi musuh bersama kolonialisme. Sumpah Pemuda merupakan awal simbolis dari tekad untuk membentuk suatu bangsa yang “Satu Bangsa “, “Satu Bahasa “, “Satu Tanah Air “.Pembentukan bangsa tersebut tidaklah sederhana, memerlukan proses pendidikan yang panjang dan terencana, semangat untuk itu tidak melekat lama dalam tubuh *founding fathers kita,* yang semakin lama semakin surut.

Repro : Jakarta-Jakarta

Ketika negara sudah terbentuk, nasionalisme itu terlalu cepat dianggap matang, dan hanya menjadi slogan idiologis semata,

Ketika negara sudah terbentuk, nasionalisme itu terlalu cepat dianggap matang, dan hanya menjadi slogan idiologis semata, maka nasionalisme berubah menjadi hal yang sakral sehingga gugatan terhadapnya harus dilawan. Dimasa orde lama dan lebih lagi dimasa orde baru Nasionalisme -yang dikerdilkan lagi dengan slogan Persatuan dan Kesatuan- lebih sebagai instrumen melanggengkan kekuasaan. Aceh dan Timor Timur dijawab dengan DOM. Perang aceh tak kunjung selesai sementara Timor Timur yang juga tidak sedikit mengeluarkan biaya baik materi maupun jiwa lepas begitu saja setelah melalui referendum - terlepas dari kontroversi yang meliputinya - dengan kekalahan yang telak pada pihak Indonesia.

Apa yang diketahui sebagai nasionalisme hanyalah dalam sombol-simbol pahlawan-pahlawan nasional, tugu pahlawan atau upacara-upacara bendera. Kesemuanya itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang nasionalisme sehingga nasionalisme pun hanya dimengerti sebatas simbol-simbol. Indentitas-indentitas lokal pun hilang diganti atau di paksakan dengan identitas nasional, kesadaran akan identitas bersama itu menghilangkan identitas lokal. Padahal Identitas Nasional itu tak kurang absurdnya denga nasionalisme itu sendiri.

Munculnya semangat-semangat kedaerahan dapat dimengerti dari sudut ini. Bagaiman maraknya tuntutan daerah-daerah untuk memunculkan identitas-identitas lokalnya dengan konsep Putra Daerah misalnya, atau keinginan daerah untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Semua itu merupakan bentuk gugatan terhadap ketidakadilan dan penindasan dimana nasionalisme Indonesia juga dimulai dari konsep itu, dan hal itu diganti dengan ketidakadilan di sebuah kesatuan baru - dalam negara Indonesia.

Separatisme juga dapat dimengerti terhadap ketidakadilan itu. Ketika Aceh - misalnya- masuk kedalam entitas baru yang bernama Indonesia. Ketidakadilan yang yang diperjuangkan bersama dalam entitas itu justru terjadi lagi didalamnya.

Bangsa Indonesia tidak mengingat perbedaan-perbedaan kultur dari bangsa-bangsa yang membentuknya, kesemuanya dianggap tidak boleh muncul dengan alasan nasionalisme yang tidak melalui sutu proses panjang untuk memahami perbedaan-perbedaan itu sebagai kekayaan bangsa lebih hanya ancaman bagi yang lain. Hal ini dapat di lihat dengan mencuatnya kasus Ambon, Sampit dan daerah-daerah lain yang memunculkan isu SARA atau rasa tidak puas atas dominasi salah satu kultur atau dominasi salah satu kultur. Bukankah ini menujukkan bahwa kita belum merasa sebagai satu bangsa seutuhnya.

Nasionalisme Indonesia perlu untuk dipertanyakan lagi karena tidak membawa keadilan negara dalam kontrak sosialnya dengan suku-suku pembentuknya. Rasa Kebangsan yang timbul dari perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan dijawab dengan ketidakadilan dan penindasan. Ada suatu daerah yang sangat maju dalam pembangunan tetapi disatu sisi ada yang sangat terbelakang. Dimana Nasionalisme yang memawa konsep perlawanan itu, ketidakadilan dan penindasan hanya berganti oleh entitas baru yang tidak lebih buruk dari sebelumnya.

Nasionalisme Indonesia harus didekontruksi sehingga dapat menjawab masa-lah kekinian bangsa. Nasionalisme tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai keutuhan wailayah poltik bangsa. Tidak boleh ada lagi ketidak adilan dan penindasan yang menjadi konsep awal kemunculannya. Hal itu sekali lagi tidaklah gampang dan membutuhkan proses sejarah yang panjang, tetapi semangat kebangsaan ini harus dihidupkan dan dipertahankan terus menerus.

Problem perbedaan dan keberagaman kulturan bangsa Indonesia harus dapat diatasi sehingga kepribadian bangsa yang disebut dengan kepribadian Indonesia dapat terwujud. ■

Lalu. A
SekUm MAHKAMAH

Apakah Aku Harus Bangga Dengan Negaraku ?

Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam kacamata
Dan kubenamkan topi baret di kepala
Malu aku jadi orang Indonesia

(bait ke 4 baris 6-8 Malu (aku) Jadi Orang Indonesia)

Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus di kampung-kampung biasanya diselenggarakan acara meriah yang diisi dengan ber-bagai macam lomba balap ka-rung, tarik tambang, makan krupuk, bazaar murah, pang-gung hiburan, arisan, bahkan pesta besar. Semua kegiatan itu pada pagi harinya diawali dengan upacara bendera yang diikuti para siswa sekolah dasar dan menengah, juga pegawai-pegawai negeri. Setiap tahunnya di Istana negara diperingati detik-detik proklamasi dan upacara menaikkan bendera Merah Putih dengan dihadiri presiden, pejabat-pejabat tinggi, veteran perang kemerdekaan yang masih hidup, dan juga tamu-tamu negara. Semua kegiatan peringatan ini dilangsungkan pada satu hari itu dan selesai pada hari itu juga. Menjadi sebuah rutinitas tahunan bagi anak-anak dan orang tua mereka untuk ikut-ikutan lomba tarik tambang, makan krupuk,dan lomba khas 17-an lainnya.

Dibalik semua itu, apakah bapak-bapak, ibu dan anak-anak yang ikut lomba, upacara bendera, dan acara besar lainnya yang mengatasnamakan kemerdekaan bangsa itu mengerti apa arti kegiatan tersebut? Masyarakat melakukan semua rutinitas tahunannya. Kecintaan terhadap bangsa dan negara yang telah ditanamkan sejak SD biasanya terungkap jelas pada acara tahunan ini. Tetapi kemudian rutinitas bisa jadi hanya sebagai kamuflase masyarakat yang menganggap bahwa negaranya hanyalah tempat dia hidup, makan, berkeluarga, lalu mati dan tidak merasa dirinya menjadi warga negara pengabdi negara atau nasionalis. Nasionalisme sebagai sebuah perasaan dan filosofi sosial yang lazim dimiliki sebuah bangsa, dalam masyarakat Indonesia dapat dikatakan pudar. Hanya segelintir orang saja yang mungkin masih memiliki hasrat bernasionalis, dan kemungkinan besar dimiliki oleh atlet-atlet olahraga yang bertanding di luar. Kita dapat melihat betapa terharunya Susi Susanti ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan dalam sebuah pesta olahraga dunia, dan juga atlet-atlet cabang olahraga lain yang berbuat hal yang sama.

Art: Ery

Nasionalisme sebagai sebuah social experiences atau pengalaman sosial, sudah diwariskan sejak dari jaman negara ini pertama kali terpikirkan oleh kaum nasionalis di jaman perintis kemerdekaan. Para pendiri negara menurunkan rasa nasionalis sebagai rasa senasib sepenanggungan dan terus diwariskan dalam bentuk doktrinasi pendidikan baik di tingkat dasar, sampai perguruan tinggi. Sayangnya, pewarisan ini kemudian menjadi statis dan lama kelamaan terkikis oleh orde-orde pemerintahan yang menilai bahwa nilai kebangsaan dan nasionalisme dapat dipakai sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Masyarakat yang mengalami hal yang statis ini kemudian jenuh lalu menjadikan rasa kebangsaan sebagai ritual tahunan memperingati 17-an tanpa menyadari filosofi negaranya sendiri. Sungguh beda ekspresi veteran dan janda perang kemerdekaan dengan wajah pejabat yang duduk di panggung kehormatan istana negara sewaktu upacara 17-an. Ini membuktikan bahwa rasa kebangsaan dan kebanggaan terhadap

negara tidak diwariskan secara sempurna.

Seorang teman pernah mengatakan bahwa nasionalisme telah mati, yang lain mengatakan bahwa nasionalisme hanya ada di dalam film-film sejarah kemerdekaan yang usang dimakan jaman, kemudian apakah negara Indonesia masih bisa dibanggakan? Bagi sebagian orang mungkin bisa merasakan bahwa negara ini sama sekali tidak bisa dibanggakan, seperti judul salah satu puisi penyair besarTaufik Ismail, Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia, dan semakin membuktikan bahwa negara ini kering dengan nasionalisme, kering dengan rasa bangga terhadap negaranya sendiri. Bangsa Indonesia sebagai sebuah kelompok sosial telah terpecah dan tersebar, karena jiwa dan perasaan kebangsaan dan bangga terhadap negaranya sendiri telah hilang maknanya.

Apakah nasionalisme akan terus menghilang? Jika memang hilang dan masyarakat negara tidak meredefinisi dan menemukan kembali arti filosofis kebangsaan dan nasionalisme ,maka dapat dipastikan negara Indonesia positif terkena virus degradasi moral kebangsaan yang sangak akut. Kata yang sangat muluk memang, tetapi apakah salah jika saya menyatakan bahwa tanpa nasionalisme, sebuah bangsa tidak dapat menjadi bangsa yang terpandang, apa kata negara-negara tetangga dan bangsa lain jika menemukan seorang Indonesia yang malu terhadap dirinya karena dilahirkan di Indonesia. Banyak negara-negara di dunia, berkembang dengan kecepatan yang luar biasa karena masyarakat negara mereka menanamkan nasionalisme kedalam diri mereka sejak kecil. Penanaman nasionalisme yang diwariskan dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat mampu mempertahankan rasa bangga mereka terhadap bangsa mereka sendiri, di suatu negara bahkan mempergunakan tokoh komik sebagai simbol heroik dan kepatriotan bangsa.

Repro: Yahoo.com

Sedangkan di negara kita sendiri, pewarisan rasa nasionalisme sangatlah kaku. Kita diajarkan rasa kebangsaan dengan disuruh menghafal butir-butir, kalimat-kalimat panjang dan simbol-simbol penghormatan yang sudah usang. Rasa nasionalisme dan kebangsaan bukanlah sebuah idiom yang tidak dapat diganggugugat. Rasa segan terhadap ideologi yang dibentuk para pendiri negara memang perlu, tetapi jangan sampai mengesampingkan nilai-nilai kebangsaan yang bisa disampaikan dengan bentuk lain yang tidak kaku. Masyarakat yang dihantui dengan segala bentuk penataran dan doktrinasi tentang kebangsaan, perlu diberikan sebuah penyegaran nasionalis, dan juga harus diperhatikan mengenai pewarisan nilai-nilai tersebut kepada generasi selanjutnya. Sebab tanpa pewarisan yang memperhatikan unsur-unsur nasionalisme tersebut, maka hanya akan mengulang sejarah buruk yang ada sekarang.

Amerika sebagai sebuah contoh negara yang warga negaranya terkenal sangat individualis dan liberal, ketika menerima serangan terhadap negaranya, tiba-tiba berubah menjadi sangat nasionalis. Bendera nasional mereka berkibar di pinggir jalan, di halaman rumah dan dimana-mana, nilai nasionalisme muncul secara luar biasa. Pewarisan nilai kebangsaan yang dilakukan secara gencar sangat nyata terlihat ketika negara tersebut mengalami serangan yang hebat terhadap rasa bangga warga negara atas negara kebangsaan mereka. Lalu apakah Indonesia harus mengulangi penjajahan 3 abad untuk mendefinisikan kembali nasionalisme kita yang samar-samar ini? Ir. Soekarno salah satu pendiri negara kita pernah mengatakan bahwa dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia adalah dasar kebangsaan. Bangsa Indonesia akan berhasil menghadapi serangan ekonomi global dengan merasionalkan nasionalisme sebagai sesuatu yang wajar.

Upacara dan ritual tahunan setiap tanggal 17 Agustus dapat digunakan sebagai awal kita untuk melihat kembali kedalam masing-masing bahwa banyak hal yang dapat kita banggakan sebagai orang Indonesia, dan berharap bait keempat puisi milik Taufik Ismail tidak akan terjadi lagi untuk yang kedua kali. ■

A. Mudito

KRITIK IDEOLOGI HUKUM NASIONAL

Hukum Nasional dimaksudkan sebagai tata aturan yang berlaku di Indonesia secara formal dan menyeluruh. Dalam suatu sistem hukum terdapat berbagai mekanisme yang harus dicamkan, seperti bentuk hukum, sistematika, substansi dan kemungkinan penegakkannya dihubungkan dengan maksud yang ingin dicapai serta kadar kemampuan dan kebutuhan subyek hukum.

Berkaitan dengan fungsi hukum, biasanya dikategorikan menjadi dua; sebagai *tool of social engineering* dan *social control*. Fungsi ini dalam implementasinya tidak akan jauh dari pola kekuasaan yang melingkupinya sehingga kadang lebih merupakan akomodasi berbagai kepentingan dengan cara patronase dan kompromisasi.Yang terjadi kemudian adalah hukum yang birokratik dan tidak populis.

Sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari faktor kejiwaan pembuatnya. Kalau dirunut ke belakang masih ada sisa-sisa fungsi hukum nasional yang bersifat kolonial. Hal ini karena adanya pasal aturan peralihan yang masih memungkinkan berlakunya hukum buatan penjajah, sedangkan hukum yang dibuat bangsa sendiri masih bersifat tambal sulam dan belum dekonstruktif. Keadaan ini dapat menjadi daging yang membusuk dan *epidemis* terhadap keseluruhan proses yang berlaku dalam penyelenggaraan negara dan pencapaian masyarakat yang dicita-citakan.

Sistem hukum nasional yang demikian dapat dianalogikan dengan kisah *ashabul kahfi*. Ada orang yang menerobos waktu dan terlempar ke masa depan yang berjarak 309 tahun dengan mengantongi sekeping mata uang. Ketika ia akan membelanjakan uang tersebut si pembeli tidak mau menerimanya karena sudah ketinggalan zaman dan tidak berfungsi lagi

Untuk mendekonstruksi sistem hukum agar lebih dapat memasyarakat dan sesuai tuntutan zaman, Al-Jabiri memberikan tiga pendekatan; metode strukturalisme (*al-mu`alajah al-bunyawiyah*), analisis sejarah (*at-tahlil at-tarikhy*), dan kritik ideologi (*an-Naqdu al-Idiyoluji*). Dalam pendekatan kritik idiologi berarti menyingkap fungsi
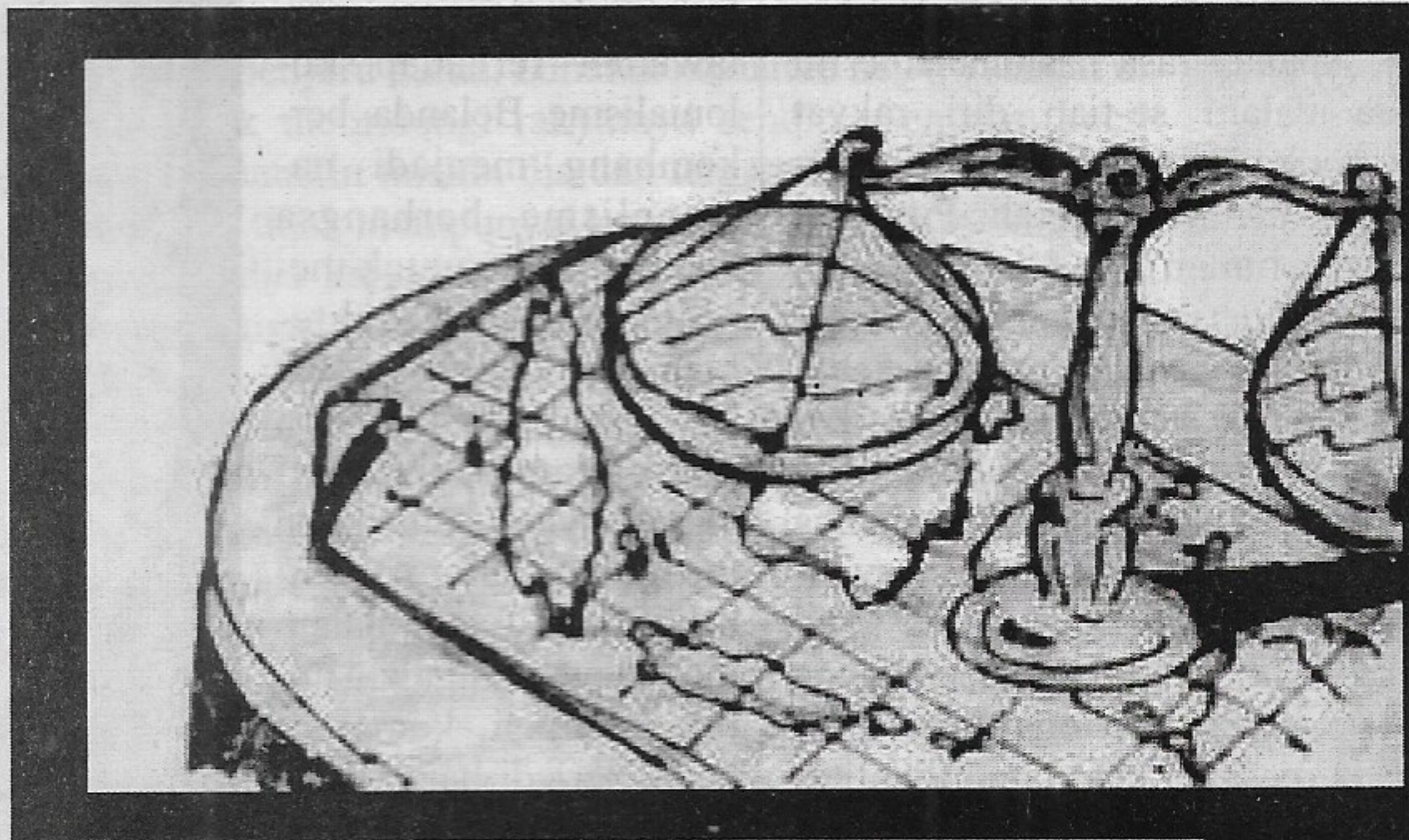
ideologis, termasuk fungsi sosial politik yang dikandung sebuah teks atau pemikiran tertentu yang sengaja dibebankan kepada teks tersebut dalam satu sistem pemikiran (episteme) tertentu yang jadi referensinya.

Ideologi mengandung satu keyakinan penganutnya secara mutlak dan memberinya kekuatan untuk bertindak dengan revolusioner. Agama dalam taraf-taraf tertentu bukan merupakan ideologi jika hanya menjadi alasan pembenar status quo untuk menjustifikasikan klaim-klaim otortiternya. Ia hanya akan menjadi ideologi jika dapat menjadi spirit bagi manusia untuk membebaskan dirinya dari kesyirikan sosial dan berjuang untuk menghancurkan atau meminimalisir mitos-mitos ketidakadilan dunia antara timur dan barat dan antara penguasa dan rakyat. Ideologi kadang juga berasal dari filsafat walau tidak selalu. Ia lebih mungkin muncul dari proses kemanusiaan akibat tekanan-tekanan yang tidak wajar. Proses itu bisa dialami secara individual dan membuatnya patut disebut ideolog atau dari semangat kolektivitas karena *common pressure* yang diderita secara masif. Dengan demikian, ideologi mempunyai tiga pentahapan. Pertama, cara kita melihat dan menangkap keadaan alam, eksistensi dan manusia. Kedua, terdiri dari cara khusus dalam kita memahami dan menilai keadaan-keadaan itu. Ketiga, mencakup usulan-usulan, metode-metode, berbagai pendekatan dan keinginan yang kita manfaatkan untuk mengubah status quo yang kita tidak puas.

Di waktu bercokolnya penjajah dulu, keadaan hukum yang ada tidak akan lebih dari alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Biasanya hal ini dituangkan dalam politik hukum pemerintah. Bagaimana ketika Penjajah Belanda membagi status subyek hukum menjadi beberapa bagian, secara

Bersambung ke Hal. 9

NASIONALISME DAN EKONOMI INDONESIA

Berbagai ungkapan tentang "nasionalisme" begitu marak lagi muncul kepermukaan terutama pada bulan Agustus. Mengapa? Karena pada tanggal 17 Agustus Bangsa In-donesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang merupakan hari bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Apakah rasa nasionalisme itu masih ada dalam se-tiap diri rakyat Indonesia ataukah hanya diartikan dengan mengibarkan bendera Merah Putih di halaman depan rumah?

Berangkat dari nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan ,kesatuan ,kesamaarataan serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik ,ialah pembentukan dan pelestarian negara nasional ,maka pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas ,pembentukan solidaritas lewat proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi .(Hertz,1945,passim)

Pada awalnya rasa nasionalisme di Indonesia timbul sebagai respon terhadap kolonialisme yang dijalankan Belanda. Eksploitasi secara besar-besaran terhadap seluruh kekayaan alam di wilayah jajahan Belanda di Indonesia sangat menyengsarakan rakyat.Kesengsaraan akibat penindasan Belanda menimbulkan kesadaran untuk lepas dari ikatan kolonialisme yang menumbuhkan perasaan senasib sepenanggungan yang berupa nasionalime. Seperti diungkapkan oleh Sartono Kartodiharjo (1972:64) bahwa nasionalisme sebagai gejala historis, timbul sebagai jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, politik , ekonomi dan sosial tertentu. Kondisi-kondisi yang dimaksud adalah munculnya kolonialisme dari suatu bangsa terhadap bangsa lain.

Rasa nasionalisme itu terus berkembang sampai tibalah suatu momentum yang sangat berarti dan bersejarah bagi bangsa Indonesia yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia .Apakah rasa nasionalisme sebagai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pupus setelah indonesia merdeka? Rasa nasionalisme yang terbentuk menurut perkembangan kesadaran berbangsa dalam waktu lama tentu tidak mudah untuk dipatahkan dan berlalu seperti hembusan angin begitu saja. Rasa nasionalisme yang terbentuk sebagai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda berkembang menjadi nasionalisme berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas rakyat ke arah perbaikan dan peningkatan ekonomi rakyat, yang dilakukan melalui program pembangunan. Tetapi dalam rangka pembangunan untuk mengisi kemerdekaan terjadi banyak ketimpangan baik secara ekonomi, politik dan kehidupan sosial masyarakat dan berakibat pada timbulnya kecem-buruan dan kesenjangan sosial pada kehi-dupan bangsa. Muncullah nasionalisme kelompok atau golongan ,nasionalisme daerah. Nasionalisme kepentingan yang saling bertentangan yang mengakibatkan pertikaian antar kelompok atau golongan dan daerah yang mempunyai tujuan dan kepentingan berbeda, bukan kepentingan bangsa dan negara. Timbullah kerusuhan di berbagai daerah seperti di Aceh ,kalimantan, Ambon. Perasaan nasi-onalisme terhadap bangsa dan negara te-lah berubah menjadi nasionalisme go-longan atau daerah.

Perkembangan perekonomian di Indonesia selalu di warnai intervensi pemerintah yang sangat besar tetapi tidak didukung oleh moralitas pelaku ekonomi yang baik. Bahkan semakin menurun dan membuat mereka bertindak serakah. Perekonomian Indonesia yang sejak awal sudah sangat tergantung pada pinjaman dan bantuan luar negeri.Upaya perbaikan perekonomian pada awal kemerdekaan di mulai dengan nasionalisasi de Javasche Bank yang bertujuan untuk mengatasi krisis keuangan negara.Upaya lain dengan memberikan pinjaman pada para pengusaha pri-bumi, tetapi upaya ini gagal karena terjadi penyalahgunaan dana yang diberikan oleh pemerintah.Pinjaman dari pemerintah terhadap para pengusaha besar ternyata berasal dari pinjaman luar negeri yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat.Bahkan pembiayaan penyelengaraan negarapun berasal dari pinjaman luar negeri. Rezim Suharto dengan prioritas utama pembangunan e-konomi yang me-nuntut adanya hubungn erat antara In-donesia dengan negara-negara maju, membuat terbentuknya kebijakan politik yang ditujukan untuk memudahkan mendapatkan pinjaman dan bantuan luar negeri. Apalagi pada masa orde baru Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan AS, sehingga mudah menarik investor asing masuk.

Setelah kolonialisme tidak dapat dipertahankan lagi maka negara-negara besar dengan modal surplus mencari pemecahan dengan melakukan pemindahan ekonomi ke negara-negara berkembang yang tersedia kekayaan alam melimpah dan upah buruh murah. Setelah kemenangn AS dalam perang dingin dengan Uni Soviet,AS memegang kendali semua perkembangan ekonomi didunia ini dan menjadi motor penggerak bagi setiap perubahan mendasar bagi dasar-dasar ekonomi dunia dengan liberalismenya. Untuk kepentingan negara-negara barat di bentuklah IMF dan Bank Dunia, negara-negara barat dengan enaknya dapat mengintervensi negara lain di bidang

ekonomi. Setiap perkembangan negara-negara di dunia ditentukan dengan ikut tidaknya negara tersebut dalam program program IMF dan Bank Dunia. Indonesia terjebak dalam cengkraman IMF dan Bank Dunia yang hanya semakin membobrokan dan menggembelkan sendi-sendi kehidupan ekonomi Indonesia yang merembet ke bidang-bidang lainnya. Dengan mudahnya IMF dan Bank Dunia mengobok-obok seluruh kehidupan bangsa ini yang tidak bisa berbuat apapun,tunduk dan patuh pada IMF dan Bank Dunia. Sejak rezim ORBA telah terjadi kesepakatan dengan IMF dan Bank Dunia, utang yang pada waktu itu telah jatuh tempo tidak dapat di lunasi karena pada saat itu terjadi penurunan harga minyak bumi dan gas di pasaran Internasional yang merupakan andalan utama ekspor Indonesia dan penyumbang terbesar bagi keuangan negara sehingga pendapatan negara menurun.Untuk menutupinya di buatlah kesepakatan untuk membuat hutang baru untuk menutupi hutang lama.Beban hutang yang harus dilunasi semakin besar dan membuat Indonesia tergantung pada pinjaman dan bantuan luar negeri

Krisis ekonomi yang mulai melanda bangsa ini sejak Juli 1997 membuat bangsa ini semakin terpuruk dengan jatuh temponya pembayaran utang luar negeri yang tidak dapat dilunasi. Dibuatlah kesepakatan hutang baru dengan IMF. Kesepakatan itu mengandung lima point penting* . *Pertama*, The Rule of Market (perdagangan bebas*).Kedua*,Pemotongan pengeluaran publik oleh negara,misal pemotongan anggaran pendidikan,kesehatan.*Ketiga*,deregulasi ekonomi yaitu peraturanperaturan yang memudahkan perdagangan bebas,misal membuka kern impor beras. *Keempat*, privatisasi yaitu dengan cara menjual BUMN-BUMN kepada investor-investor swasta baik asing maupun domestik.Terakhir,*kelima* menghapuskan konsep kebaikan publik dan diganti tanggung jawab individual,dan ini mempunyai konsekuensi dari liberalisme ekonomi terutama pada pemotongan pengeluaran publik sehingga nantinya problem rakyat tidak mendapatkan pendidikan bukanlah tanggung jawab negara melainkan tanggung jawab individual.

Padahal negara-negara di bawah naungan IMF tidak semakin membaik perekonomiannya. IMF di Argentina justru semakin membuat rakyatnya melarat. Apakah Indonesia akan menirunya? Pendidikan, Kesehatan yang menjadi tanggung jawab individual semakin memberatkan rak-yat. Kalau rakyatnya sebagian besar hanya lulusan SD, kekurangan makan dan gizi, bagaimana dia dapat bersaing di era globalisasi ini. Sudah bodoh, sakit-sakitan, cacingan lagi. Mana mungkin maju bangsa ini. Mana mungkin kita dapat mempunyai daya saing di era globalisasi. Globalisasi tidak akan memintarkan rakyat kalau bukan negaranya sendiri. Pada era globalisasi ini di mana batas kekuasaan suatu negara semakin buram dan tidak jelas. Kemajuan teknologi, komunikasi dan teknologi akan mempermudah perpindahan manusia dan barang.Kemajuan komunikasi membuat orang dengan cepat berhubungan orang lain di seluruh penjuru dunia. Dimana kekuatan negara sangat di butuhkan untuk melindungi rakyatnya sendiri. Semakin kecil suatu negara semakin miskin dia dan tergantung pada kekuatan negara lain dan tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi bangsanya sendiri karena mau tidak mau setiap negara harus saling berhubungan dan menggantungkan kepentingan dengan negara lain. Negara besar akan tetap membutuhkan negara lain untuk transaksi ekonomi dan keuangan. Sebab jika ia memaksa untuk tetap memproduksi di negaranya sendiri akan membuat miskin rakyatnya sendiri. Upah buruh sangat besar maka diadakan pemindahan modal dan industri ke negara lain yang mempunyai sumber daya alam yang besar dan upah buruh murah. Mau tidak mau setiap negara membuka dirinya dengan negara lain agar maju. Negara maju akan dapat bertahan karena mereka lebih kompetitif dan jeli melihat peluang.

Lalu bagaimana dengan Indonesia ? Apakah bangsa ini mempunyai daya tawar dan daya saing dalam era globalisasi ini ? Indonesia yang semakin terpuruk dalam cengkraman IMF, ancaman disintegrasi yang mengancam keutuhan bangsa. Dengan gampangnya IMF membodohi kita, mengeruk semua kekayaan kita dan mendikte semua kebijakan dan kegiatan bernegara. Sebuah bentuk penjajahan baru yang diterima bangsa ini dengan terbuka bahkan bangsa ini yang mengemis memintanya. Jadi jangan salahkan bangsa lain kalau kita bodoh mau dijajah Belanda selama lebih 100 tahun atau dijajah IMF untuk waktu yang tidak diketahui. Jangan salahkan bangsa lain kalau kita dininabobokkan dengan kekayaan yang hanya dapat kita lihat dinikmati bangsa lain.

Benarkah gagasan Anderson yang mengatakan bahwa nasionalisme yang di pahami berbagai bangsa adalah kesadaran palsu belaka ? Apa kesadaran nasionalisme palsu yang terjadi di Indonesia sehingga bangsa ini tidak bisa lepas dari berbagai persoalan dan pertikaian yang ada dalam tubuh bangsa ini sendiri. Kalau antar komponen tidak serasi dan bertentangan, bagaimana bisa berhadapan di percaturan ekonomi dunia. Sedangkan bangsa ini tenggah digerogoti IMF.Tinggal menunggu keajaiban Tuhan kah ? ■

Nining

**Sartono Kartodiharjo, "Kebangkitan Nasional dan Nasionalisme Indonesia"*

**Arfi Bambani dalam kuliah alternatif BPPM FH UGM Mahkamah "Ekonomi Politik Indonesia : Sebuah Penjajahan gaya baru"*
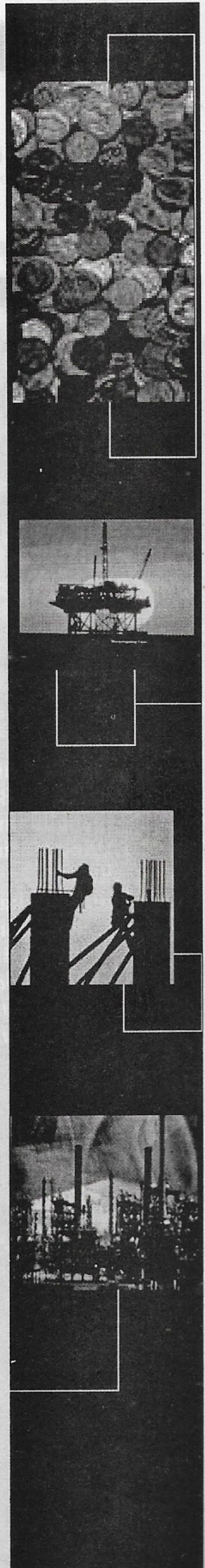
BAYANG-BAYANG NEGARA YANG ANTI-NASIONALISME

Bangsa yang besar, tetapi berjiwa kerdil, mengagung-agungkan sejarah, tetapi tanpa pemahaman makna, ibarat mitos yang mempersatukan eksistensi sebuah komunitas, ketika fakta mitos terkuak, maka ambruklah **perekat** ***komunitas itu.***
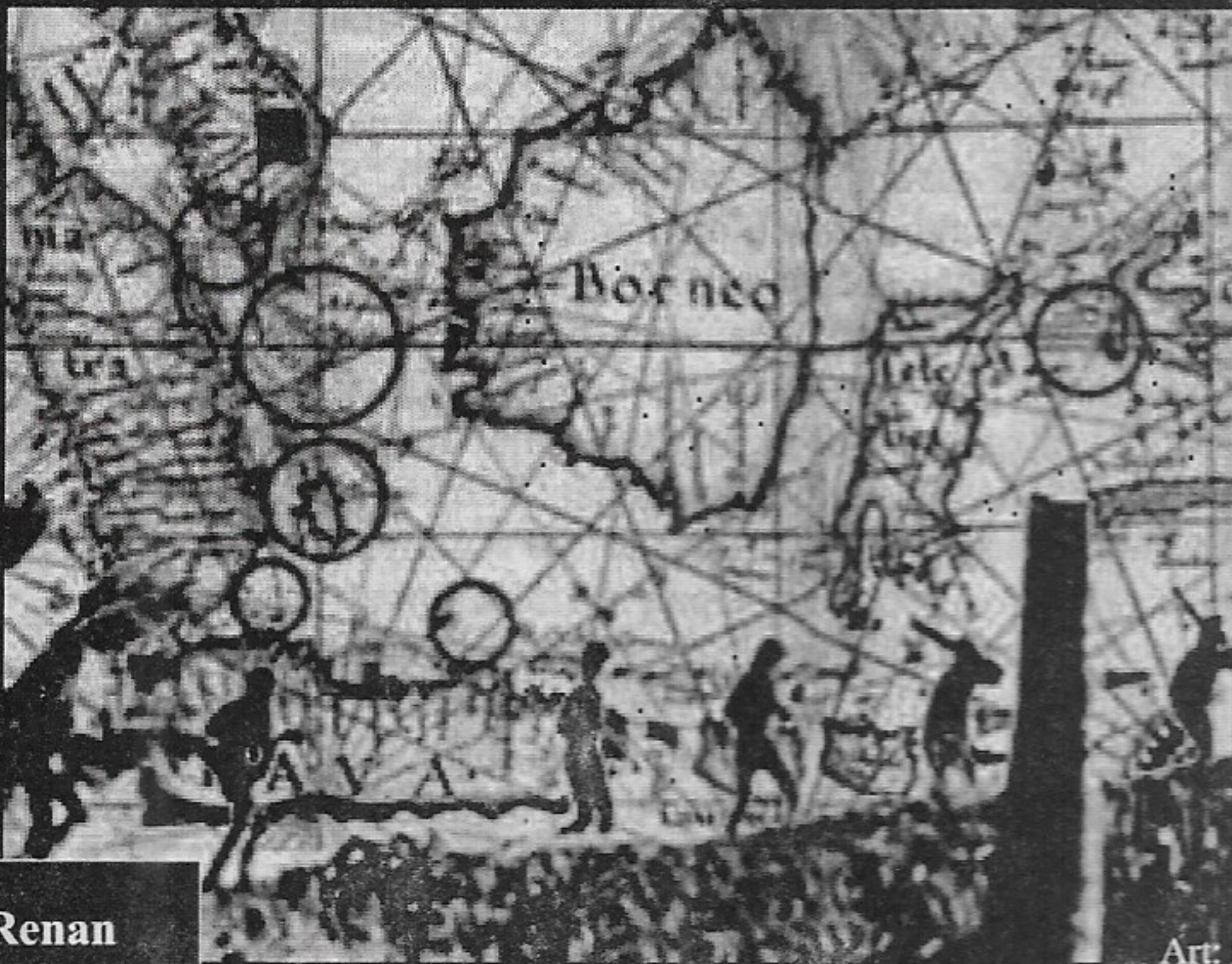
Art: Ery

> **Ernest Renan dan Otto Bauer mengilhami Bung Karno untuk menegaskan sesuatu yang amat penting : *kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alami, melainkan historis.***

Filsafat negara yang digagaskan filsuf Prancis, Ernest Renan, " le desir d'etre ensemble ", dambaan untuk menyatukan diri, dipinjam mendiang Bung Karno sebagai basis filosofis integrasi Sabang sampai Merauke. Paham nasionalisme Soekarno meng-gulirkan fakta kehadiran negara. Sebuah negara nasio-nal yang dipersatukan oleh nasib pernah dijajah Be-landa (**Mangunwijaya 1998: 9-11**).

Dalam pemahaman teoritis, nasionalisme merupakan ideologi besar abad ke-18 yang sering dirumuskan sebagai format pemersatu sebuah bangsa. Menurut Elie Kedourie, seorang perumus ulang pemahaman nasionalisme, nasionalisme adalah **"….the doctrine holds that humanity is naturally divided into nations, that nations are known by certain characteristics which can be ascertained, and that are only legitimate type of government is national-selfgovernment…" (Kedourie 1961: 9)**. Nasionalisme, dengan demikian, merumuskan suatu negara yang berspektrum otonom lewat muatan realitas yang riil dalam pergulatan politik, pergulatan ekonomi, budaya maupun pergulatan lainnya. Negara nasional, merangkai pemahaman option to the reality dari nasionalisme lewat konstruksi pemerintahan yang berkarakter demokratik. Pemahaman demokrasi yang menjunjung identitas riil rakyat menghubungkannya dengan konsep nasionalisme yang mengusung cita-cita integrasi sebuah bangsa (nation). Hal inilah yang memicu nasionalisme, demokrasi dan sosialismenya Dr. Sun Yat Sen atau Bung Karno, pada masa-masa awal perjuangan mereka.

Nasionalisme sebenarnya sebuah cita-cita rakyat yang ditransformasikan ke dalam doktrin. Hal ini nampak dalam nasionalime historis yang awalnya tak pernah membangun suatu kerangka teori. Nasionalisme hanya suatu perjuangan dari kondisi impasse nasib yang tak kunjung usai. Indonesia, sebagai sebuah bangsa, juga pernah mengalami momen awal nasionalisme historis. Fakta sejarah yang menunjukkan semangat heroik rakyat, memunculkan semangat emansipatoris. Dalam konteks inilah, nasionalisme yang sesungguhnya itu. Nasionalisme merupakan spirit rakyat, suatu kehendak bersama karena stimulus sejarah. Hal ini juga nampak dalam elaborasi filosofis dua filsuf besar dari Perancis dan Jerman. Hasrat untuk bersamanya Ernest Renan dirumuskan juga oleh Otto Bauer (Jerman), bahwa " eine nation ist eine aus schikalsgemeinschaft erwachsene charakter gemeinschaft ", bangsa adalah komunitas bercita-cita yang tumbuh dari komunitas senasib. Ernest Renan dan Otto Bauer mengilhami Bung Karno untuk menegaskan sesuatu yang amat penting : *kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alami, melainkan historis.*

Pendekatan diakhronis Soekarno terhadap nasionalisme, merumuskan suatu solusi penting bagi sejarah bangsa : menjadi sebuah negara adalah hasil kerja orang-orang kecil yang menjadi besar. Negara nasional harus merepresentasikan makna ini. Ketika banyak kelas bawah membutuhkan modal, tetapi negara tidak memberi karena alasan krisis moneter, bukankah itu menyimpangi konteks nasionalitas sebuah negara nasional ? Ketika banyak rakyat jelata yang tidak diberi modal oleh negara, tetapi mampu mengumpulkan modal sendiri, kemudian negara datang menggusur, menindas, bahkan membunuh, bukankah itu sebuah negara yang anti-nasionalisme ? Ketika

banyak pejabat yang pandai berbicara nasionalisme, tetapi terus-menerus menjual rakyat lewat korupsi milyaran rupiah, bukankah hal itu menyangkal pemahaman nasionalisme sebagai komunitas yang senasib ?

Apakah benar Indonesia adalah sebuah negara nasional ? Ataukah hanya sebuah negara ? Jika hanya sebuah negara, maka menjadi terbukalah mitos integrasi, bahwa Indonesia sebagai negara, mempersatukan wilayahnya hanya berdasarkan ketakutan. Negara hanya bisa berfungsi, ketika rakyat takut berekspresi dan takut menuntut. Tatkala negara lemah, maka runtuhlah nasionalisme semu itu. Daerah-daerah pun menuntut untuk merdeka, sementara negara kalang kabut mencari solusi. Itulah fakta Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah negara, hanya bisa benar-benar menjadi negara nasional, kalau mampu merumuskan kembali jati dirinya sebagai bangsa, bukan negara. Sebagai bangsa, Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang senasib karena kemiskinan. Identitas inilah yang ditularkan ke dalam pemahaman Indonesia sebagai negara. Sehingga sebagai negara, Indonesia menjadi tahu diri secara politik maupun ekonomi. Secara ekonomi, misalnya, Indonesia tidak menjadi negara yang melacurkan diri, hanya untuk memenuhi citra sebagai negara besar, pada hal berwatak kerdil, tidak mempunyai jiwa kebangsaan. Karakter nasionalisme sesungguhnya ada, ketika kita memperjuangkan kaum marginal sebagai proyeksi dari wajah bangsa secara keseluruhan. Orang miskin, orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk maju, orang yang tidak berpendidikan..etc., merupakan wajah nasib bangsa. Memperjuangkan hak-hak mereka berarti turut merasakan apa dan bagaimana mereka mengalami hidup sebagai anak bangsa. Dalam konteks inilah, pemahaman nasionalisme, baik secara historis, maupun teoritis, menemukan pembenarannya. ■

(Steny_Bernard)

Pendukung tulisan :

- Elie Kedourie, *Nationalism*, Frederick A. Praeger New York Publisher, 1961
- Y. B. Mangunwijaya, *Menuju Republik* Indonesia *Serikat*, Gramedia, 1998

Lanjutan Hal. 5 **Kritik Ideologi...**

subyektif ingin menunjukkan superioritasnya yang eurosentris, dan pada akhirnya akan menumbuhkan elitisme hukum. Dalam HIR misalnya, tidak dimungkinkan melakukan praperadilan sehingga penguasa akan aman dari kritik, juga menempatkan terdakwa secara inquisitive akan memungkinkan pihak berwenang (baca : penguasa) bertindak sekendaknya sendiri yang jauh dari keadilan umum.

Ketika zaman Orde Baru ada politik hukum yang dibuat sesuai fungsi ideologis yang berkembang dalam pandangan hidup masyarakat. Politik hukum ini dituangkan dalam Ketetapan MPR No IV Tahun 1973 yang menghendaki adanya tata hukum In-donesia yang sesuai de-ngan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi sua-sana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Dalam tahap im-plementasi ternyata banyak mengalami deviasi baik karena kekuatan politik sudah menjadi *absolute power* juga hal-hal yang menyebabkan *bargaining position* masyarakat rendah sehingga pihak *policy maker* me-lancungkan peraturan yang dibuatnya dengan dalih stabilitas ekonomi-politik yang cukup menguntungkan minoritas elit di pusat-pusat kekuasaan.

Dalam masa seperti sekarang ini menurut klasifikasi Nonet dan Selznick keadaan hukum baru dalam tahap otonom di mana hukum diberi tempat tersendiri dan tidak lagi sekedar menjadi saluran penggunaan kekuasaan oleh penguasa walau jika tidak dimanfaatkan dengan baik bisa menjurus kepada suatu kekuasaan absolute demi hukum dan membelakangi kontek sosialnya. Kemudian hukum perlu di fungsikan tidak sekedar mendefinisikan *(judgement de feite)* atau menilai *(judgement de valeur)* tapi diusahakan untuk dapat merubah secara substantif.

Pembangunan hukum di Indonesia dapat menjalankan fungsi ideologisnya jika pandangan umum masyarakat diakomodasi dan, meminjam istilah Satjipto Rahardjo, diadakan teorisasi hukum Indonesia yang di samping mampu memberikan gambaran hukum Indonesia juga menjelaskan keadaan hukum dalam masyarakat. Menurut beliau, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah; faktor rancangan UUD 1945, faktor perubahan sosial, faktor (pengalaman) sejarah, faktor dasar kerohanian Pancasila, faktor konsep dan doktrin yang berkembang, faktor internasional, dan faktor geografi/demografi.

Landasan ideologis sistem hukum Indonesia terkait juga dengan Falsafah Pancasila yang dianggap sebagai *welstanchuung* bangsa Indonesia yang sudah final. Faktor pengalaman sejarah dan kefanatikan individu acapkali memunculkan klaim kebenaran mutlak terhadap ideologi tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral. Hal ini menafikan faktor gerak kejiwaan manusia yang selalu beradaptasi dengan dinamis. Benar bahwa Falsafah Pancasila adalah *geist* bangsa Indonesia tapi bukan berarti memuat beban sejarah dan tidak menghilangkan sifat keprofanannya. Ka-lau hal ini disadari, maka akan terjadi ge-rak yang progresif dalam me-nginterpretasikan amandemen Pembukaan UUD 1945 dan Sistem hukum secara keseluruhan sesuai dengan modernitas ilmu dan teknologi tanpa harus kehilangan etika spiritual budaya bangsa.

Dalam setiap perubahan diperlukan sikap kedewasaam manusianya. Ia tidak larut oleh tipu daya kemajuan dan tetap berpegang pada hati nurani yang bebas dari penindasan moral. Juga tidak bersikap sebaliknya dengan lari dari realitas dan membuat apologi-apologi yang pengecut, seperti dalam retorika **Plato**; "Mengapa orang yang berpikiran lurus selalu menghendaki perubahan, padahal perubahan adalah tanda dari ketidaksempurnaan ?". ■

Heru Nugroho

NASIONALISME INDONESIA DALAM JEBAKAN KAPITALISME GLOBAL

Kapitalisme telah membangun sekat-sekat yang rapi. Lewat kapitalisme nilai-nilai ekonomi lebih diunggulkan ketimbang yang lainnya . Melalui kapitalisme muncullah golongan sosial baru yakni kelas sosial yang mendapatkan pendapatan karena keuntungan dari usaha mereka dan bunga yang didapat karena tabungan atau piunjaman. Jelas dalam kapitalisme telah terjadi perubahan hubungan yang signifikan antara lapisan lapisan sosial dalam masyarakat. Sehingga dalam sistem kapitalisme yang sudah maju bukan lagi negara tapi modal adalah segala-galanya. Walaupun kapitalisme mengusung ide demokrasi dan liberalisme tapi wacana ini hampir mustahil diwujudkan dalam tatanan ekonomi yang timpang. Demokrasi yang bersmboyan " Semua warga negara sama dihadapan hukum " dan liberalisme berteriak " Hak seseorang atas dirinya " menjadi sebuah tiupan dalam masyarakat kapitalis. Kapitalisme menjadi kontradiktif dengan nasionalisme yang mempunyai cita-cita kolektif, sebuah solidaritas nation.

Dalam masyarakat kapitalis terdapat jutaan penduduk yang menjual tenaganya dengan harga murah pada minoritas orang yang memiliki modal dan harus mengalami penderitaan jika tidak ada majikan yang membeli tenaganya atau tiba-tiba harus di PHK. Seseorang tak mempunyai hak atas dirinya karena harus meyerahkan pada mekanisme ekonomi yang menindas. Dalam konteks inilah daulat rakyat sebagai aset nasionalisme mengalami proses reduksi.

Memang tiap kekuasaan yang berwatak kapitalis, akan selalu mensyaratkan berbagai bentuk perbudakan manusia. Keinginan yang kuat untuk mendominasi, menguasai muncul melalui berbagai aturan-aturan yang pada dasarnya bertujuan pokok melakukan kontrol agar tidak ada perlawanan pada modal. Modal memang dengan usaha keras akan mengendalikan tatanan hukum, tatanan sosial bahkan pada tingkatan tertentu ' Selera '. Modal mewujud dalam berbagai bentuk pada sisi tertentu menjalankan negara yang karena kewenangannya akan selalu melakukan, pertama kontrol efektif agar kepentingan ekonomi tetap menguntungkan kelas berkuasa, kedua selalu berusaha menengahi setiap konflik kelas yang muncul dan menjaga keberadaan " Tatanan yang akan mereproduksi ekonomi borjuis ". Negara memang tetap dibutuhkan pada perkembangan kapitalisme awal tapi lama kelamaan negara akan 'melenyap' seiring dengan kekuasaan modal yang menjelma dalam berbagai organ-organ sosial masyarakat. Negara nasional , sebuah integrasi antara kompleksitas nation, yang berkiblat pada kapital-sentris dengan sendirinya terjebak pada mata rantai ekonomi borjuasi. Negara bukan lagi sebuah representasi *nations*, tetapi representasi *modal*. Fenomena ini bisa menjadi jawaban atas kondisi diskrepansi antara kehendak rakyat dengan kemampuan negara yang bermuara pada ditinggalkannya **vox populi**.

Kapitalisme mungkin bukan kata asing lagi untuk didengar, bahkan tak ada keraguan sedikitpun, karena kita hidup dalam era ini. Sebuah masa dimana peran modal begitu unggul dan keyakinan akan ampuhnya modal semakin kuat.

Tantangan kaum revivalis atau fundalis terhadap globalisasi

Globalisasi dan kapitalisme bagi mereka sebagai salah satu agenda barat dan konsep non islami yang dipaksakan pada masyarakat muslim. Meskipun tidak menggunakan analisasi politik ekonomi kelas mereka menolak kapitalisme dan globalisasi yang keduanya termasuk paham liberalisme. Itulah makanya kaum revivalis yang lebih dikenal sebagai kaum fundamentalis sejak lama dipinggirkan oleh developmentalisme dan globalisasi, dan akan dianggap sebagai salah satu ancaman terpenting kapitalisme dimasa mendatang. Kaum revivalis selama ini telah menemukan cara yang tepat untuk melakukan resistensi terhadap menekan mereka yakni para pendukung modernisasi dan kapitalisme global. Mereka menerbitkan buku, mengorganisir kelompok diskusi militan dikalangan mahasiswa, menciptakan simbol resistensi termasuk dalam cara berpakaian, bahkan mencoba menciptakan proyek percontohan sistem kemasyarakatan dan sistem ekonomi tertutup yang merupakan suatu gagasan alternatif terhadap kapitalisme. Keberadaan mereka bisa menjadi refleksi kritis terhadap keberadaan negara yang "banci" terhadap proyek-proyek masif modal. Mereka bukan tujuan , tetapi simbol perlawanan dari orang-orang yang masih cinta terhadap identitas negaranya sendiri. ■

(youlie)

KETIKA GLOBALISASI DIPERTANYAKAN
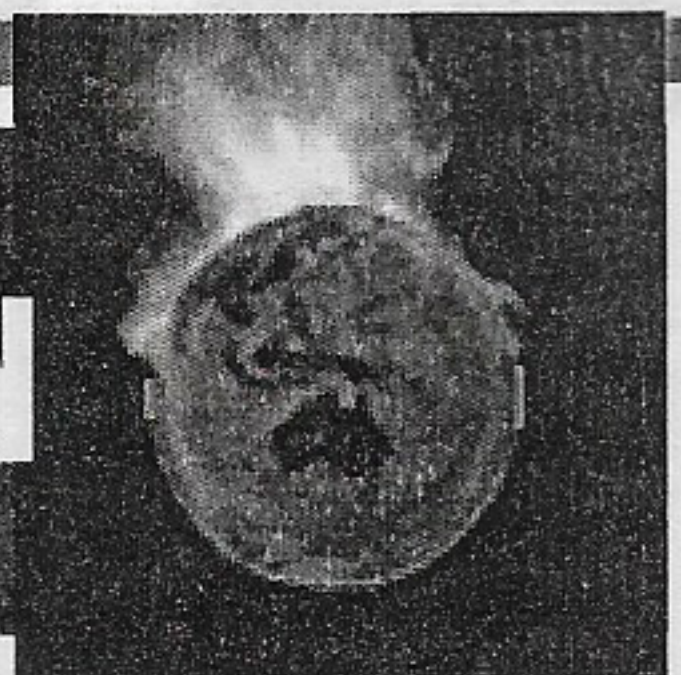
Globalisasi adalah proses menyatunya planet bumi dalam satu kesatuan sistem atau kaedah yang sama. Ini ditandai dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan tekhnologi khususnya komunikasi dan transportasi. Berkembangnya telekomunikasi dari telepon sampai internet memudahkan manusia untuk berhubungan antara satu dengan yang lain. Jarak seakan memudar, dunia menjadi tak terbatas. Mobilisasi begitu mudah dan kebebasan gerak maupun langkah menjadi tujuan manusia-manusia dinamis.

Jika dicermati lebih jauh, globalisasi menimbulkan perubahan-perubahan besar, tidak hanya dalam tatanan ekonomi tetapi juga non ekonomi. Seperti dikemukakan oleh Dr. Heru Nugroho dalam tulisannya '*Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*', bahwa globalisasi adalah proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya kecenderungan wilayah-wilayah di dunia, baik geografis maupun fisik, menjadi seragam dalam format sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan sosial proses global telah menciptakan egalitarianisme, di bidang budaya memicu munculnya "Internationalization of culture", dibidang ekonomi menciptakan saling ketergantungan dalam proses produksi dan pemasaran, dan dibidang politik menciptakan "liberalisasi".

Kita perhatikan sekarang bahwa era global mulai nampak. Ditandai dengan integrasi ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, juga ekspansi pasar melalui pasar bebas. Di Asia Tenggara khusus negara-negara anggota ASEAN akan diberlakukan AFTA pada tahun 2003, di kawasan Asia Pasifik di bawah payung APEC akan diberlakukan pasar bebas pada tahun 2010 bagi negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang baru mulai sepuluh tahn kemudian. Begitu pula dengan WTO pada tahun 2020. Dalam pandangan masyarakat negara berkembang, termasuk Indonesia, pasar bebas dapat dikiaskan sebagai sebuah "invasi" negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Dikatakan demikian karena negara-negara maju sebagai negara industri mempunyai basis yang kuat dalam hal tekhnologi. Negara-negara yang menguasai teknologi kemungkinan besar akan merajai pasar dunia. Pertanyaan besar muncul di benak kita, apakah Indonesia siap menghadapi era perdagangan bebas ? Apa yang bisa kita tawarkan bagi pasar global ?

Globalisasi vs Nasionalisme

Arus globalisasi yang melanda dunia paling tidak menimbulkan dua konsekuensi logis, pertama kemanfaatan yang didapat secara umum yaitu adanya kesejahteraan bila didukung dengan kebijakan yang berkeadilan sosial, kedua, potensi melemahnya rasa nasionalisme. Globalisasi bertentangan dengan nasionalisme. Globalisasi cenderung menipiskan rasa semangat kebangsaan bangsa-bangsa yang ada di dunia dengan adanya homogenitas baru. Sedangkan nasionalisme bisa berarti rasa kebangsaan. menurut Siswono diartikan sebagai kesadaran berbangsa, yaitu kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang lahir secara alamiah karena sejarah, karena aspirasi perjuangan rasa lampau, karena kebersamaan kepentingan, karena rasa senasib dan sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini, serta kesamaan pandangan, harapan dan tujuan dalam merumuskan cita-cita bangsa untuk waktu yang akan datang. dengan kata lain, rasa kebangsaan itu adalah perekat yang mempersatukan dan memberikan dasar kepada jati diri kita sebagai bangsa.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah jati diri seperti apakah yang dimiliki bangsa ini ? Apakah masih ada rasa nasionalisme di hati kita ? atau masih ingatkah kita dengan sejarah nasional perjuangan bangsa yang penuh heroisme ? Kecenderungan yang sekarang timbul adalah munculnya idola-idola baru bagi anak-anak kita seperti *Power Rangers, Batman, Spiderman* yang penuh nuansa heroik. Jarang sekali ada anak yang mengidolakan pahlawan-pahlawan nasionalnya sendiri. juga kebanggaan yang memudar terhadap makanan lokal seperti tiwul, ubi, beras jagung. makanan fast food, pizza, dan segala yang berbau western lebih menjadi pilihan. Restoran lokalpun harus bersaing dengan membanjirnya Franchise 'Mc D', 'KFC', 'Dunkin Donuts', dsb.

Keprihatinanpun bertambah dengan merebaknya film-film Hollywood yang dibarengi pula dengan kelesuan perfilman nasional dalam waktu cukup lama, kemudian beragamnya busana dengan merk-merk ternama tentunya mematikan pasaran lokal. Budaya kekerasan yang sehari-hari ditampakkan oleh media, free sex, narkoba, segala tayangan vulgar mendominasi pemberitaan. semua hal yang dipaparkan diatas tidak mengherankan lagi. kini, tak bisa dipungkiri, bahwa globalisasi membawa implikasi sosial dan budaya yang panjang untuk diperdebatkan. Implikasi seperti mewabah sikap hidup materialistik dan individualistik, pudarnya nilai-nilai kebersamaan, tergantikannya sikap rendah hati dan rela berkorban menjadi ketamakan dan pamrih. sirnanya keramahtamahan karena rasa penuh curiga dan ironisnya lagi, anak-anak mulai kasar dan tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Satu hal yang perlu direnungkan pula yaitu sikap konsumerisme masyarakat seperti yang dipaparkan diatas. Sedangkan implikasi dalam tatanan budaya secara keseluruhan yaitu munculnya *Cultural lag* dan *Cultural Shock*.

Sebenarnya globalisasi bukanlah momok melainkan tantangan yang harus dihadapi negara-negara di dunia ini. Indonesia mampu bersaing secara sehat, maka yang dibutuhkan sekarang adalah persiapan yang matang baik SDM maupun SDA, penguasaan teknologi menjadi keniscayaan. selain itu perangkat hukum harus diciptakan dalam menunjang iklim persaingan usaha yang kondusif, misalnya aturan mengenai perusahaan transnasional dan cyber crime. Ini menjadi pekerjaan rumah para pemimpin kita. ■

(Shanty)

Banyak orang yang mencintai negaranya, tetapi sedikit orang yang membelanya. Karena itu, jangan tanya apa yang negara buat untuk kamu, tetapi tanyalah apa yang kamu buat untuk negara (John F. Kennedy).

Nation dan demokrasi

Pabottimgi sendiri merumuskan demokrasi sebagai sistem politik di mana berlaku "rasionalitas politik saling kontrol dan saling imbang tiga lapis berlandaskan semangat kesetaraan serta musyawarah, yang bekerja secara horisontal maupun vertikal dan tegak di atas prinsip keabsahan esensial serta keabsahan prosedural dan kumulasi dari semua itu adalah pengukuhan kedaulatan rakyat." Secara singkat, demokrasi ba-ginya cukup disebut "a three-layered checks and-balances political rationality".

Sebagai modal kerja demokrasi, otosentrisitas adalah singkatan dan penajaman dari diktum "dari, oleh, dan untuk rakyat" di mana rakyatlah yang berdaulat. *Nasion* adalah kolektivitas politik yang otosentris. Ia adalah *rakyat* atau *bangsa* dengan agenda besar politik yang sama. Nasion memiliki kedaulatan historis atas wilayah politik yang sama. Kesamaan agenda besar politiknya lahir dari pengalaman serta bacaan historis yang sama dan, dari situ, rangkaian cita-cita politik yang juga sama. Hal itu di utarakannya pada Semiloka Nasional berjudul "Evaluasi Kritis Atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945" yang diselenggarakan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada 8-9 Juli 2002.

Konsep otosentrisitas sendiri adalah konsep yang dianjurkan Pabottingi. Jika kurang lebih tiga dekade lampau Theda Scokpol menulis tentang "bring the state back in," sejak sekitar sepuluh tahun terakhir Pabottingi menganjurkan agar kita mengembalikan **sentralitas nasion** dalam memahami demokrasi, terutama dengan konsep yang dia sebut **otosentrisitas** (*autocentricity*), yang berarti penyantunan dan/atau perkiblatan suatu *negara* serta komunitas *bangsa* ke nasion sendiri. Ini berarti bahwa bangsa sendirilah secara keseluruhan yang selalu diuntungkan, disantuni, dikiblati, dan diprivilesekan dalam praktek dan kebijakan politik, ekonomi, dan hukum apa pun yang berlaku di dalam negara.

Adalah Rupert Emerson sebagaimana di kutip Pabottingi yang menunjukkan tesis seminal tentang hubungan simbiosis antara nasion dan demokrasi dalam karya klasiknya *From Empire to Nation*. Secara genealogis, nasion lebih menentukan bagi kebangkitan demokrasi, meskipun harus ditekankan pula bahwa demokrasi memperkuat akar-akar nasion. Kondisi seperti ini dapat dimengerti jika

Amatlah penting memasukkan kembali faktor *nasion* –bukan *nasionalisme*– untuk memahami demokrasi dalam kerangka genealogi dan mekanisme kerjanya (Mochtar Pabottingi).
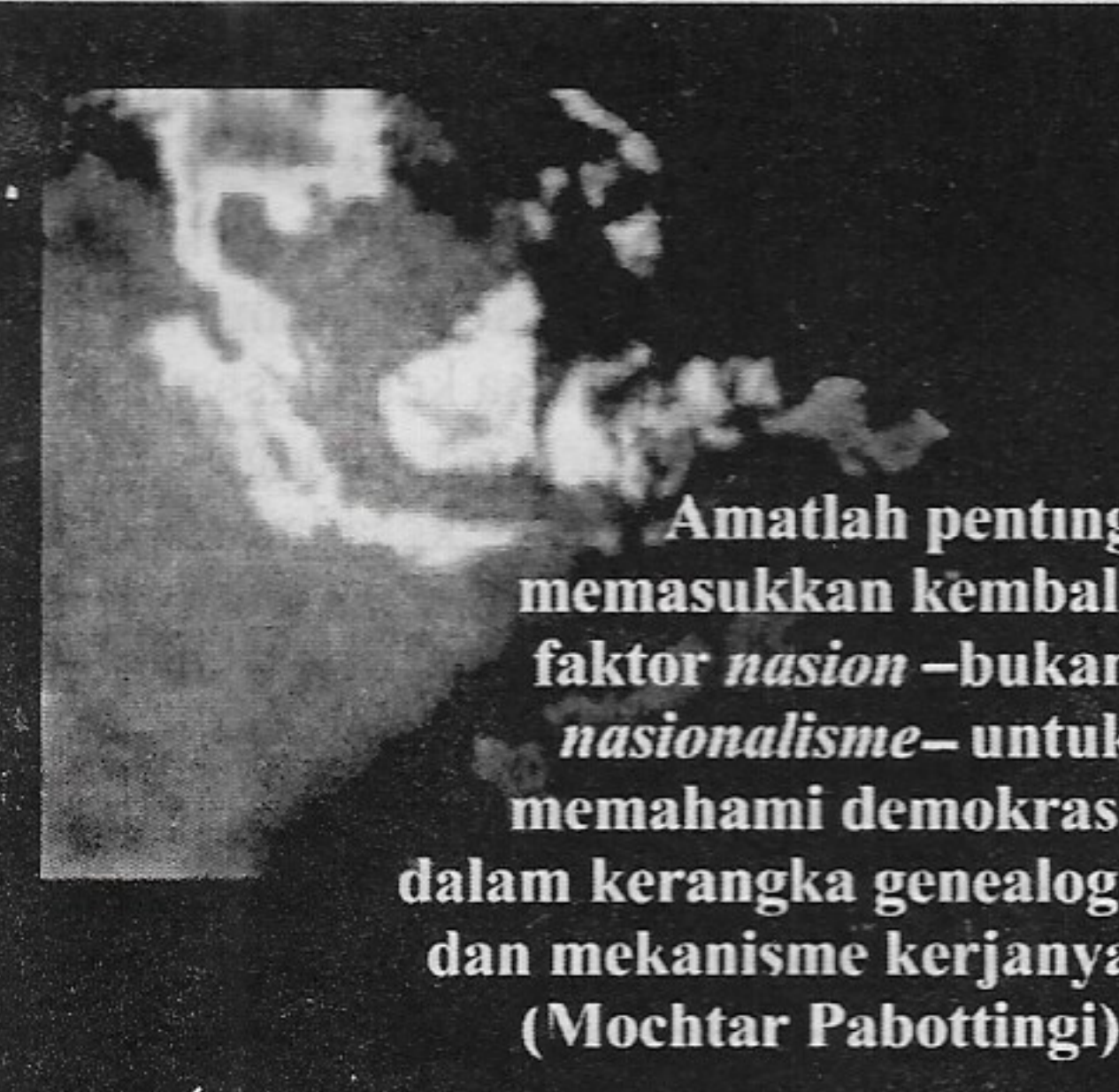
disadari bahwa nasion tumbuh dari prinsip-prinsip **inklusivisme, solidaritas, kesaling-percayaan**, dan **kemerdekaan** (sebagai *independence*)empat prinsip yang sesungguhnya lahir dari pengalaman sejarah serta cita-cita politik yang sama. Demokrasi bertolak dari prinsip-prinsip **keadilan** (*justice*; *equality*), **kemerdekaan** (sebagai *freedom*; *liberty*), **rasionalitas, supremasi hukum**, dan **keberadaban** (*civility*).

Keempat prinsip yang menumbuhkan nasion pada gilirannya memudahkan tumbuhnya demokrasi dengan kelima prinsipnya. Selanjutnya terjadilah simbiosis nasion-demokrasi yang sekaligus berarti perjalinan erat antara keempat dan kelima prinsip yang berlaku pada keduanya. Simbiosis itulah yang membuat tiap demokrasi akan selalu merupakan demokrasi *nasion*al. Maka jika kita terbiasa menggunakan istilah *nation-state* (negara-nasion), kita pun mestinya membiasakan istilah demokrasi-nasion. Otosentrisitas menjadi modal kerja nasion sebab nasion kita ketahui memang lahir dari kesamaan pengalaman historis dan cita-cita politik yang menumbuhkan solidaritas, kesaling-percayaan, inklusivisme, dan kemerdekaan tadi. Selanjutnya, otosentrisitas inilah yang menjadi modal utama bagi tumbuh dan berkembangnya rasionalitas politik sistemik.

Dan atas tesis Emerson yang menunjukkan adanya simbiosis dan kiprah saling-menentukan (*mutual determination*) antara antara nasion dan demokrasi, Pabottingi memberikan dua konsep tambahan, yaitu otosentrisitas dan rasionalitas politik. Dengan kedua konsep tambahan itu Pabottingi lalu mengutarakan dua tesis tambahan, yaitu bahwa *otosentrisitas hanya mungkin di dalam nasion* dan bahwa *rasionalitas sistemik pada demokrasi hanya mungkin karena berlakunya moda politik yang otosentris*. Genealogi demokrasi jadinya dapat ditunjukkan dalam matrik-dua-kali-dua berikut:
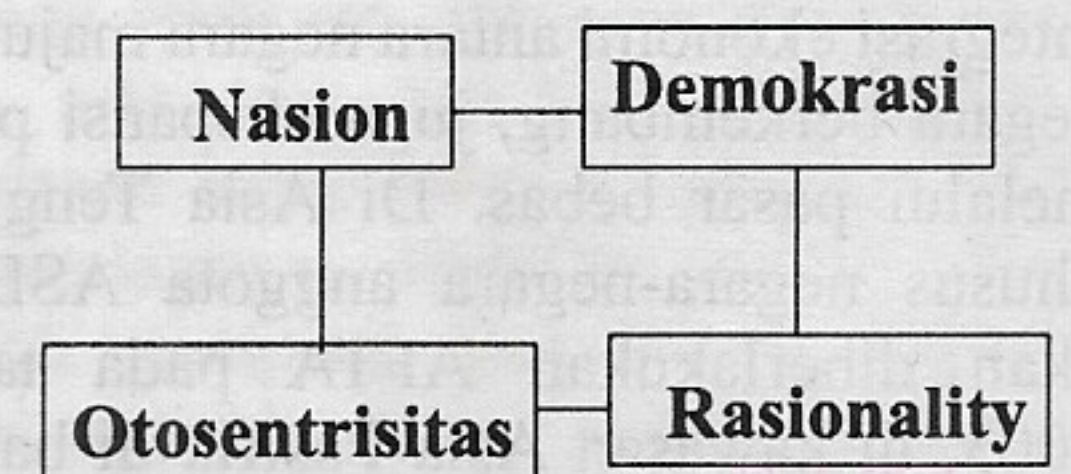
Luthfi WE

Pelindung : Tuhan YME **Pemimpin Umum** : M. Hafidullah **Sekretaris Umum** : Luthfi WE, Lalu A **PemRed** : Steny B , Ayu Siti Maryam **Kalitbang** : Saikhu, Rara **Pemimpin Perusahaan** : Inggrid W, Abib **KaPSDM**: Nando, Ojak **Bendahara** : Pipit, Cici **RedPel Majalah** : Ayu **RedPel Pledooi** : Heru **RedPel Mahkamah News**: Tyas **Staff Redaksi** : Santi, Maryanus, Anita C, Endah, Laila, Lilis, Ade G, Adib,Dino,Ayik, Ade, Yuli ,Dewi,Ika, Romanus, Pepenk **Staff Pe rusahaan**: Asti,Adi,Isti ,Yuhar, Dewi, Nining,Eka **Staff Litbang** :Arif, Angki, Damai, Andre, Anang,Yoeli, Budi, Ali **Staff PSDM**: Nesti, Ira, Ery **Layout** : Ery **Alamat Redaksi** : Jl.Socio Justicia I Bulaksumur Yogyakarta 55281 Telp.(0274) 901280 Fax. (0274) 52781 Email: Red_mahkamah@eudoramail.com sekret_mahkamah@yahoo.com